

## TANTANGAN PENERAPAN *SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)* DI INDONESIA STUDI KASUS PADA WILAYAH PESISIR

Fety Widianti Aptasari<sup>1</sup>

Baiq Krisnina Maharani Putri<sup>2</sup>

Khairul Mujahidi<sup>3</sup>

Ely Windarti Hastuti<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Mataram (Indonesia)

<sup>1</sup>[fetyaptasari@staff.unram.ac.id](mailto:fetyaptasari@staff.unram.ac.id), <sup>2</sup>[baiqkrisninamputri@staff.unram.ac.id](mailto:baiqkrisninamputri@staff.unram.ac.id),

<sup>3</sup>[Khairul\\_mujahidi@staff.unram.ac.id](mailto:Khairul_mujahidi@staff.unram.ac.id), <sup>4</sup>[elywindarti@staff.unram.ac.id](mailto:elywindarti@staff.unram.ac.id)

### ABSTRACT

*Socio-economic inequality in Indonesia remains a serious problem, with most of the country's wealth controlled by a small minority of the population. Coastal communities, especially fishermen, face severe poverty, prompting various entities to implement economic empowerment programs. However, the effectiveness of these programs is often questioned, leading to the Social Return on Investment (SROI) method being used to measure the social, economic and environmental impacts of such investments. SROI offers a more comprehensive evaluation approach, but its application in Indonesia, especially in coastal areas, is still very limited. This study aims to analyze the challenges of applying SROI in Indonesia's coastal areas, with a focus on economic empowerment programs. These challenges come from program providers, such as corporations that focus on regulatory compliance, governments that are more output-oriented, and NGOs with limited resources. In addition, challenges also come from beneficiaries, including low levels of education, short-term orientation towards aid, and daily economic constraints. This research offers a contribution to the development of more effective and sustainable economic empowerment policies and strategies in Indonesia, in order to reduce socioeconomic inequality nationwide.*

**Keywords :** *Social Return on Investment, Corporate Social Responsibility.*

### PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Menurut World Bank (2015) pertumbuhan ekonomi cenderung hanya menjadi konsumsi bagi sebagian besar masyarakat mampu, yaitu mencapai 20% dari jumlah penduduk. Widyani (2017) menjelaskan ketimpangan tersebut juga menggambarkan dari total kekayaan yang hanya dikuasai segelintir

orang. Di Indonesia, 49,3% total kekayaan negara hanya dimiliki oleh sekitar 1% penduduk.

Permasalahan ketimpangan di Indonesia tidak hanya terjadi dalam dimensi antar perorangan namun juga antar wilayah. (Badan Pusat Statistik, 2018) rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari tiga dekade terakhir tergolong tinggi, namun pada priode yang sama tingkat kesenjangan pendapatan juga tergolong

tinggi. Tingkat kemiskinan pada periode 1970–2017 memiliki rata-rata 13,9% di kawasan perkotaan sedangkan di kawasan perdesaan mencapai 19,0 persen.

Wilayah yang banyak menjadi lumbung kemiskinan adalah pesisir. Sekitar 2 juta nelayan menyumbang 25% angka kemiskinan nasional (KNTI, 2020), sehingga masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan (Wasiaturrahma et al., 2020). Bahkan, masyarakat nelayan dianggap sebagai kelompok termiskin di Indonesia (Sari et al., 2020). Oleh karenanya banyak entitas mulai dari pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan perusahaan swasta membuat program pemberdayaan yang menargetkan masyarakat pesisir (Gachter et al, 2017).

Ketimpangan sosial ekonomi yang berbanding lurus dengan tingkatan pengangguran akan berdampak pada ketimpangan kesehatan dan kesejahteraan sosial (Shao et al, 2016; Kim, 2016). Untuk menanggulangi hal tersebut, program pemberdayaan yang dilakukan beragam seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, memperbaiki akses terhadap sumber

daya ekonomi, dan mendukung pengembangan keterampilan lokal.

Dilain sisi, efektivitas program-program tersebut sering dipertanyakan, mengingat tantangan besar dalam mengukur dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di berbagai negara maju, Social Return on Investment (SROI) telah menjadi metode yang diakui untuk mengevaluasi efektivitas program-program pemberdayaan ekonomi. SROI merupakan pendekatan evaluasi yang mengukur nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu program atau proyek, dibandingkan dengan investasi yang telah dikeluarkan.

Roberts Enterprise Development Fund (REDF) mengembangkan metodologi SROI pada tahun 1996 untuk mengevaluasi kontribusi modal. REDF meneliti seberapa besar sumber daya mereka meningkatkan kehidupan masyarakat (Corvo et al., 2022). New Economics Foundation (NEF) mendefinisikan Social Return on Investment (SROI) sebagai mekanisme untuk menghitung nilai finansial dari sumber daya yang dibelanjakan. Ini mencakup manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Metode SROI memonetisasi biaya dan manfaat sosial dibandingkan dengan biaya keuangan dan operasional untuk mengukur dampak tidak berwujud

suatu proyek. Pemangku kepentingan dapat memanfaatkan SROI untuk mengevaluasi kinerja sosial dan lingkungan (Iyer & Agrawal, 2014).

SROI mengkuantifikasi dampak triple bottom line suatu perusahaan untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Triple bottom line, yang mengharuskan investasi memberikan nilai terpadu dengan meningkatkan hasil sosial, ekonomi, dan lingkungan. SROI adalah indeks pengembalian yang mengubah hasil sosial menjadi finansial dengan membagi perkiraan nilai manfaat dengan perkiraan investasi (Corvo et al., 2022).

Ada dua jenis analisis SROI yakni evaluatif dan perkiraan. SROI evaluatif didasarkan pada hasil aktual di masa lalu. Oleh karena itu, hal ini dilakukan setelah proyek selesai dan data aktual mengenai dampak potensial tersedia. Perkiraan SROI didasarkan pada proyeksi. Ini mengukur kuantitas nilai sosial yang akan dihasilkan suatu proyek jika tindakannya membuahkan hasil yang diinginkan (Iyer & Agrawal, 2014).

Di Indonesia, penerapan SROI masih sangat terbatas yang disebabkan banyak sekali faktor mulai dari tantangan internal pemberi program, keterbatasan kompetensi dari penerima manfaat, hingga kondisi sosial dan makro ekonomi. Oleh karenanya,

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan dalam penerapan Social Return on Investment (SROI) di wilayah pesisir Indonesia. Adapun konteks program yang diberikan entitas dalam kajian ini berfokus pada program pemberdayaan ekonomi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam konteks kajian SROI di Indonesia, yang hingga kini masih sangat terbatas. Dengan menyoroti perbedaan antara pendekatan CSR yang sering kali hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban sosial perusahaan dan pendekatan SROI yang lebih komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan di wilayah pesisir Indonesia, serta mendukung upaya pengurangan ketimpangan sosial ekonomi di tingkat nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur analisis kritis untuk mengeksplorasi ketimpangan sosial ekonomi di wilayah pesisir Indonesia serta penerapan Social Return on Investment (SROI) dalam program pemberdayaan ekonomi. Sumber data utama berasal dari literatur

sekunder, termasuk artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan data statistik yang relevan. Data dikumpulkan dengan menyeleksi literatur berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diorganisasikan berdasarkan tema utama, seperti ketimpangan sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi, dan SROI.

Analisis dilakukan melalui pembacaan mendalam dan identifikasi tema untuk mengevaluasi argumen serta relevansi literatur dengan konteks wilayah pesisir Indonesia. Hasil analisis ini disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai isu yang diteliti. Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas, dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber. Penelitian ini, meski memiliki keterbatasan dalam ketergantungan pada data sekunder, diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang ketimpangan sosial ekonomi di wilayah pesisir dan kontribusi SROI dalam pemberdayaan ekonomi.

## HASIL PENELITIAN

### Tantangan Penerapan SROI dari Pemberi Program

Berikut adalah faktor eksternal penyebab pemberi dana program tidak menjalankan Social Return on Investment (SROI)

#### 1. Korporasi

##### a. Fokus pada kepatuhan regulasi dan reputasi

Perusahaan adalah entitas yang berorientasi laba. Oleh karenanya perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengurangi beban biaya yang dikeluarkan (Dianitha et al., 2020).

Dalam sistem ekonomi yang kapitalistis, sering kali keuntungan menjadi satu-satunya tujuan, sementara nilai-nilai seperti keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan ekonomi diabaikan (Salim et al, 2023).

Banyak perusahaan di Indonesia melaksanakan program CSR sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR. Fokus mereka adalah memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi ini tanpa harus terlibat dalam evaluasi yang mendalam seperti SROI.

Banyak korporasi melihat Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan atau sebagai strategi untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih tertarik pada pelaksanaan program yang dapat meningkatkan citra positif perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan seperti donasi atau kegiatan sosial singkat, daripada pada program pemberdayaan berjangka panjang. Hal ini membuat SROI, yang membutuhkan jangka waktu yang panjang dan analisis mendalam sering dianggap tidak perlu.

#### **b. Biaya tambahan dan kompleksitas**

Dalam konteks ekonomi yang kompetitif, perusahaan cenderung mengalokasikan anggaran CSR secara efisien (Adrai & Perkasa, 2024). Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan SROI, yang membutuhkan investasi dalam survei, pengumpulan data, dan analisis, dipandang sebagai beban tambahan. Banyak perusahaan menilai bahwa anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk kegiatan CSR langsung daripada untuk analisis dampak.

Pelaksanaan SROI memerlukan pemahaman yang mendalam tentang metodologi, analisis data, dan pengukuran dampak sosial. Banyak

perusahaan, terutama yang tidak memiliki departemen CSR yang kuat atau ahli dalam bidang ini dapat merasa kesulitan untuk menerapkan SROI. Kurangnya kapasitas internal untuk menjalankan evaluasi yang kompleks ini membuat perusahaan lebih memilih metode pengukuran yang lebih sederhana.

#### **c. Ketidakpastian manfaat**

Perusahaan menilai bahwa manfaat yang diperoleh dari menjalankan SROI tidak sebanding dengan risiko atau biaya yang harus dikeluarkan (Bustomi et al., 2024). Jika hasil SROI menunjukkan bahwa program CSR mereka tidak memberikan dampak yang signifikan, hal ini bisa berpotensi merusak reputasi perusahaan atau memunculkan kritik. Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih untuk menghindari analisis mendalam yang dapat membawa risiko reputasi tersebut.

SROI memberikan wawasan tentang dampak sosial, tetapi hasil ini tidak selalu diterjemahkan langsung ke dalam keuntungan bisnis. Perusahaan yang lebih berorientasi pada hasil finansial cenderung mengabaikan SROI karena tidak memberikan nilai tambah yang jelas terhadap bottom line perusahaan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa hasil yang kurang memuaskan dari SROI dapat digunakan oleh kritikus atau pesaing untuk

menyerang kebijakan CSR perusahaan, sehingga menimbulkan risiko reputasi.

Mengimplementasikan SROI memerlukan investasi yang signifikan dalam bentuk waktu, tenaga, dan biaya. Perusahaan harus melakukan survei, pengumpulan data lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis statistik untuk mengukur dampak sosial. Semua ini memerlukan anggaran yang tidak sedikit, yang sering kali di luar jangkauan CSR tradisional yang biasanya dianggarkan untuk kegiatan yang langsung terlihat.

Kompleksitas dalam proses tersebut termasuk kesulitan dalam mengakses data yang diperlukan dan kebutuhan untuk tenaga ahli yang mampu melakukan analisis SROI, menjadi penghalang besar bagi perusahaan. Banyak perusahaan merasa skeptis mengenai manfaat konkret yang bisa didapatkan dari menjalankan SROI.

Budaya perusahaan yang berorientasi pada hasil jangka pendek juga bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan SROI (Akbar & Dewayanto, 2022). Banyak perusahaan lebih fokus pada pencapaian target keuangan tahunan dan pengembalian investasi yang cepat, daripada pada penciptaan dampak sosial yang memerlukan waktu lebih lama untuk diukur dan dinilai. SROI, yang berorientasi pada jangka panjang, sering

kali tidak sejalan dengan budaya dan prioritas ini.

## 2. Pemerintah

### a. Fokus pada Output daripada Outcome

Pemerintah sering kali lebih terfokus pada output, yaitu jumlah program yang dilaksanakan atau jumlah penerima manfaat yang tercapai, dibandingkan dengan outcome, yaitu dampak jangka panjang dari program tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Indikator output lebih mudah diukur dan dilaporkan dalam konteks administrasi publik. Akibatnya, alat pengukuran seperti SROI, yang lebih menekankan pada penilaian dampak (outcome) sering kali diabaikan karena dianggap tidak relevan dengan target atau indikator kinerja utama pemerintah.

Contohnya seperti pembangunan infrastruktur atau distribusi bantuan sosial yang lebih mudah diukur dari segi output (jumlah jalan yang dibangun, jumlah bantuan yang diberikan). Pemerintah sering kali bekerja dengan tujuan untuk menunjukkan hasil yang cepat dan nyata kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil SROI yang terlihat dalam jangka panjang tidak sejalan dengan kebutuhan untuk menunjukkan keberhasilan program secara cepat.

**b. Birokrasi dan Kurangnya Kapasitas**

Pengambilan keputusan dalam pemerintahan sering kali harus melewati berbagai tahapan birokrasi yang kompleks. Pelaksanaan SROI memerlukan koordinasi antar departemen, pengumpulan data lintas sektor, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang semuanya bisa terhambat oleh prosedur birokrasi. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan metode evaluasi yang mendalam seperti SROI. Selain itu, birokrasi yang berlapis-lapis sering kali menyebabkan pengumpulan data yang diperlukan untuk SROI menjadi tidak cepat dan tidak efisien.

Selain itu, tidak semua instansi pemerintah memiliki kapasitas teknis untuk melaksanakan SROI. Sering kali, sumber daya manusia yang ada tidak memiliki pelatihan atau pengalaman yang memadai dalam melakukan analisis dampak sosial yang mendalam. Ini membuat pemerintah lebih cenderung untuk menggunakan metode evaluasi yang lebih sederhana dan tidak memerlukan keahlian khusus.

**c. Prioritas Anggaran**

Pemerintah harus mengelola anggaran yang terbatas untuk berbagai kebutuhan publik yang mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Muksin et al, 2024).

Dalam konteks keterbatasan ini, alokasi dana untuk melakukan SROI sering kali tidak menjadi prioritas, karena dinilai sebagai biaya tambahan yang tidak memberikan manfaat langsung. Dalam situasi krisis atau kondisi darurat, pemerintah cenderung mengalokasikan sumber daya untuk respon cepat dan penyelesaian masalah yang mendesak. Kajian dampak sosial seperti SROI sering kali dinilai tidak relevan dalam konteks darurat dan krisis.

Anggaran pemerintah sering kali terbatas dan harus dialokasikan ke berbagai sektor yang dianggap lebih mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam situasi sumber daya finansial terbatas, pemerintah cenderung menghindari pengeluaran tambahan untuk melakukan analisis mendalam seperti SROI. Oleh karenanya, pemerintah lebih memilih untuk menggunakan anggaran tersebut langsung pada implementasi program-program yang bersifat mendesak dan terlihat langsung hasilnya.

**d. Ketidakpastian Politik**

Program pemerintah sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, termasuk perubahan prioritas kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. SROI, yang membutuhkan komitmen jangka panjang untuk pengumpulan data dan evaluasi dampak, mungkin tidak selaras dengan

siklus politik yang berfokus pada hasil cepat dan langsung yang bisa ditunjukkan selama masa jabatan yang relatif singkat.

### **3. Organisasi Non-Pemerintah (NGO)**

#### **a. Terbatasnya Sumber Daya Keuangan**

Banyak NGO beroperasi dengan anggaran yang terbatas dan harus mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memastikan keberlangsungan program mereka. Pengeluaran tambahan untuk melakukan kajian SROI dapat dinilai bukan sebagai prioritas utama, terutama jika sumber daya tersebut bisa digunakan untuk langsung membantu komunitas yang membutuhkan. NGO lebih sering fokus pada implementasi program-program yang dirancang untuk memberikan dampak langsung, sehingga dana yang ada lebih baik digunakan untuk kegiatan di lapangan daripada untuk analisis dampak yang memakan biaya.

NGO sering kali fokus pada pencapaian dampak jangka pendek yang dapat segera dirasakan oleh komunitas yang mereka bantu. SROI, yang lebih menekankan pada evaluasi dampak jangka panjang dianggap tidak relevan dengan tujuan operasional mereka. Selain itu, banyak donor dan mitra NGO lebih tertarik pada hasil yang cepat dan konkret yakni yang dapat diukur dalam waktu singkat, sehingga

SROI yang memerlukan waktu lebih lama untuk menunjukkan hasilnya mungkin tidak mendapat dukungan penuh.

#### **b. Kompleksitas dalam Pengukuran Dampak**

NGO sering kali bekerja di lingkungan yang dinamis dan berubah-ubah, di mana mengukur dampak sosial secara konsisten menjadi tantangan tersendiri. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berubah-ubah dapat membuat data SROI menjadi kurang relevan atau sulit diperoleh. Mengukur dampak sosial secara kuantitatif dan menghubungkannya dengan nilai ekonomi memerlukan pendekatan metodologis yang rumit. Banyak NGO yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk melakukan analisis yang sedetail itu, sehingga lebih memilih metode evaluasi yang lebih sederhana.

#### **Tantangan Penerapan SROI dari Penerima Manfaat Program**

Berikut adalah penjelasan mengenai kendala yang berasal dari masyarakat pesisir yang dapat menghambat pelaksanaan Social Return on Investment (SROI)



## 1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

### a. Pemahaman yang Terbatas terhadap Konsep SROI

Mayoritas nelayan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya lulusan sekolah dasar, dan banyak yang bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Data dari Direktorat Sekolah Dasar (DITPSD) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa 80% nelayan kecil hanya berpendidikan di bawah tingkat SMP (Doaly, 2023).

Dengan kondisi sosial tersebut, masyarakat pesisir sering kali memiliki keterbatasan dalam literasi dasar. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang lebih kompleks seperti SROI, yang melibatkan pemahaman mengenai pengukuran dampak sosial dan ekonomi. Hal tersebut dapat berdampak pada pemahaman alasan pengumpulan data dan evaluasi dampak program tersebut penting dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

### b. Kesulitan dalam Mengisi Kuesioner atau Survei

Metode pengumpulan data analisis SROI seperti kuesioner ataupun survei sering kali terdiri dari pertanyaan yang memerlukan pemahaman yang

baik terhadap situasi sosial dan ekonomi mereka. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah besar kemungkinan mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini secara akurat. Rendahnya pendidikan juga bisa menyebabkan kesalahan interpretasi data, di mana masyarakat dapat memberikan jawaban yang tidak konsisten atau bias. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, sehingga hasil SROI mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan.

Dilain sisi, pengumpulan data dengan bantuan petugas cacah lapangan juga menghadapi tantangan berupa perilaku sosial masyarakat pesisir. Pola hidup nelayan yang tergantung dengan alam dan menghadapi risiko besar menjadikannya masyarakat dengan sifat yang keras (Vita & Yanti, 2014). Kerasnya perwatakan nelayan tidak hanya didasari oleh ketergantungan dengan alam, tetapi juga penggabungan antara perebutan akses sumber daya ekonomi yang menyebabkan harus keras. Saraha (2023) menjelaskan bahwa dalam proses edukasi maupun pengumpulan data masyarakat pesisir memerlukan kehati-hatian yang tinggi agar tidak menimbulkan konflik.

**c. Ketidakmampuan untuk Melihat Manfaat Jangka Panjang**

Rendahnya pendidikan dan buruknya kondisi ekonomi menjadikan nelayan memiliki perilaku ekonomi yang cenderung berorientasi jangka pendek. Nadjib (2013) menjelaskan bahwa mayoritas nelayan adalah kelompok masyarakat tetap miskin meskipun umumnya memiliki etos kerja tinggi. Hal tersebut dikarenakan sifat dan karakter nelayan yang konsumtif dan sering berfoya-foya. Suhartanti (2022) juga menjelaskan bahwa alasan nelayan mempertahankan gaya hidup konsumtif adalah karena gengsi.

Oleh karenanya, masyarakat pesisir sering lebih fokus pada manfaat langsung dari program, seperti bantuan tunai atau barang, daripada dampak jangka panjang yang bisa diukur melalui SROI. Ini dapat mengakibatkan kurangnya partisipasi atau antusiasme dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk SROI, karena masyarakat pesisir tidak melihat nilai atau relevansi dari aktivitas tersebut.

**2. Orientasi Jangka Pendek terhadap Penggunaan Bantuan**

**a. Pemanfaatan Bantuan untuk Kebutuhan Mendesak**

Masyarakat pesisir sering kali hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, di mana prioritas utama mereka adalah memenuhi kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketika mereka menerima bantuan, dorongan pertama mereka biasanya adalah menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan mendesak ini, daripada berinvestasi dalam usaha atau proyek jangka panjang yang mungkin tidak segera memberikan hasil. Karena bantuan yang diberikan sering kali digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, dampak jangka panjang yang diharapkan dari program tersebut mungkin tidak tercapai atau terlihat. Ini bisa mempersulit evaluasi melalui SROI, yang bertujuan untuk mengukur hasil jangka panjang dari intervensi ekonomi dan sosial.

Orientasi jangka pendek membuat masyarakat lebih cenderung menghabiskan bantuan daripada menginvestasikannya dalam proyek produktif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka dalam jangka panjang. Misalnya, bantuan yang dimaksudkan untuk pengembangan usaha mungkin digunakan untuk konsumsi langsung, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi dampak jangka panjang yang bisa diukur melalui SROI. Ketika bantuan tidak digunakan untuk tujuan produktif, potensi dampak positif yang bisa diukur oleh SROI menjadi hilang. Hal tersebut berarti program pemberdayaan dapat tidak mencapai

tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, yang menyebabkan hasil SROI tampak tidak signifikan atau bahkan negatif.

**b. Ketergantungan pada Bantuan**

Dalam banyak kasus, pemberian bantuan yang terus-menerus tanpa strategi keberlanjutan dapat menciptakan budaya ketergantungan di masyarakat pesisir. Hakim (2019) menjelaskan bahwa secara kultural perilaku nelayan kecil dapat dijelaskan melalui sifat yang disebut fatalisme. Fatalisme adalah sifat pasrah pada nasib, boros, dan sifat ketergantungan. Ketergantungan ini bisa mengurangi inisiatif masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sendiri atau mencari solusi jangka panjang.

Sebagai akibatnya, dampak jangka panjang yang seharusnya dihasilkan dari program pemberdayaan tidak terwujud, dan hasil SROI bisa menunjukkan bahwa program tersebut tidak efektif. Ketika masyarakat menjadi bergantung pada bantuan, mereka dapat tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam program yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian mereka, seperti pelatihan keterampilan atau pendidikan kewirausahaan. Ini mengurangi efektivitas program dalam menciptakan perubahan yang dapat diukur melalui SROI.

**3. Himpitan Ekonomi Sehari-hari**

**a. Prioritas pada Kelangsungan Hidup Sehari-hari**

Masyarakat pesisir sering kali hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas, di mana upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, banyak dari mereka harus berjuang setiap hari untuk mencari nafkah dan memastikan kelangsungan hidup keluarga mereka. Kondisi ekonomi yang sulit ini menciptakan pola pikir yang fokus pada kebutuhan mendesak dan jangka pendek, seperti mendapatkan makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Oleh karena itu, partisipasi dalam kegiatan yang memerlukan waktu dan tenaga tambahan, seperti pengumpulan data untuk analisis Social Return on Investment (SROI), mungkin dianggap sebagai beban tambahan yang tidak relevan dengan kebutuhan mendesak mereka.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat pesisir mungkin kurang termotivasi untuk terlibat dalam program-program yang menawarkan manfaat jangka panjang, terutama jika manfaat tersebut tidak langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, mereka mungkin merasa bahwa waktu yang dihabiskan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data lebih baik digunakan untuk kegiatan

yang menghasilkan pendapatan atau mendukung kebutuhan langsung keluarga. Kurangnya motivasi ini bisa menyebabkan rendahnya partisipasi dalam proses pengumpulan data, yang sangat penting untuk pelaksanaan analisis dampak yang komprehensif.

Pengumpulan data untuk SROI membutuhkan kontribusi dari masyarakat dalam bentuk informasi tentang kondisi mereka, manfaat yang mereka rasakan dari program, serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun, jika masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak memberikan manfaat langsung atau tidak relevan dengan kebutuhan harian mereka, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dan representatif, yang pada gilirannya dapat mengurangi keakuratan dan kredibilitas analisis SROI.

Selain itu, dalam masyarakat yang berfokus pada kelangsungan hidup sehari-hari, ada tantangan tambahan terkait dengan komunikasi dan pemahaman tentang pentingnya pengumpulan data. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana data yang mereka berikan akan digunakan untuk mengevaluasi dampak program atau bagaimana hasil dari analisis SROI dapat membantu

meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Tanpa pemahaman yang jelas dan komunikasi yang efektif, upaya untuk melibatkan mereka dalam proses pengumpulan data bisa menjadi lebih sulit.

Kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap pengumpulan data untuk SROI juga dapat mencerminkan ketidakpercayaan atau kekecewaan terhadap program-program yang sebelumnya tidak memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Jika masyarakat memiliki pengalaman buruk dengan program-program serupa di masa lalu, di mana janji-janji manfaat jangka panjang tidak pernah terwujud, mereka mungkin skeptis terhadap partisipasi dalam program baru, meskipun program tersebut memiliki potensi dampak yang positif.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perancang program dan pelaksana analisis SROI untuk memahami konteks sosial dan ekonomi di mana masyarakat pesisir hidup. Ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam semua tahap program, termasuk pengumpulan data dan evaluasi. Selain itu, memberikan kompensasi atau insentif yang sesuai untuk partisipasi mereka dapat membantu mengatasi hambatan ini. Misalnya, menawarkan

dukungan langsung yang relevan dengan kebutuhan mereka saat ini, seperti bantuan pangan atau dukungan ekonomi jangka pendek, sebagai bagian dari proses pengumpulan data, dapat meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih akurat dan komprehensif.

Secara keseluruhan, keberhasilan analisis SROI di masyarakat pesisir sangat bergantung pada kemampuan untuk memahami dan menyesuaikan pendekatan dengan realitas hidup mereka. Dengan meningkatkan keterlibatan dan memberikan manfaat yang jelas dan relevan, program-program sosial dapat memastikan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat dalam pengumpulan data tetapi juga merasakan manfaat jangka panjang dari program yang diimplementasikan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan tetapi juga memperkuat dampak sosial dari program tersebut secara keseluruhan.

#### **b. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya**

Kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan ekonomi membuat masyarakat memiliki sedikit waktu luang. Mereka mungkin harus bekerja sepanjang hari untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga tidak

memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam survei atau aktivitas pengumpulan data lainnya yang diperlukan untuk SROI. Hal ini membuat proses pengumpulan data menjadi lebih sulit dan memperlambat pelaksanaan SROI.

Kondisi tersebut disebabkan nelayan terjebak dalam hubungan patron-klien yang tidak adil. Geofrey & Kungu (2020) menggambarkan relasi patron-klien dengan tiga karakteristik utama pertama, ketidakseimbangan kepemilikan sumber daya ekonomi; kedua, adanya hubungan resiprositas di mana pihak-pihak terlibat memberi dan menerima, meskipun dalam proporsi yang tidak seimbang; dan ketiga, loyalitas yang timbul karena keterbatasan nelayan kecil dalam mendapatkan modal dari sumber lain. Karena itu, hubungan patron-klien menjadi faktor utama kemiskinan struktural nelayan kecil (Adawiyah et al., 2021).

Patron menggunakan posisi dominannya untuk memaksimalkan keuntungan dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kesejahteraan klien (Chalid & Manji, 2021). Ini menciptakan ketimpangan ekonomi yang semakin dalam, di mana para patron mendapatkan keuntungan besar sementara nelayan kecil tetap berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Dalam kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat lebih cenderung mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk aktivitas yang langsung menghasilkan pendapatan, seperti melakukan pekerjaan sampingan (Nainggolan et al, 2021). Namun kontribusi pendapatan dari pekerjaan sampingan tersebut pun tidak sampai setengah dari pendapatan utamanya sebagai nelayan sehingga belum dapat menjadikan mereka sejahtera (Pangidunan, 2023). Hal tersebut dikarenakan pekerjaan sampingan nelayan merupakan pekerjaan rendah keterampilan sehingga tingkat produktifitas ekonomi juga rendah (Arbarini, 2018).

Kegiatan pengumpulan data untuk SROI, yang tidak memberikan manfaat langsung dapat tidak dianggap sebagai prioritas. Ini dapat mengakibatkan partisipasi yang rendah dalam survei atau kegiatan evaluasi lainnya, yang mempengaruhi kualitas dan kelengkapan data.

### **Tantangan Penerapan SROI dari Faktor Eksternal**

Selain tantangan-tantangan internal dari proyek atau program, ada juga berbagai faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil perhitungan SROI. Beberapa faktor eksternal tersebut termasuk kondisi ekonomi makro,

inflasi, perubahan regulasi, dan dinamika sosial lainnya. Berikut adalah penjelasan detail tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi SROI.

### **1. Ekonomi Makro**

Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil Social Return on Investment (SROI) dari berbagai program sosial (Septasawitri et al, 2023). Dalam situasi di mana ekonomi berkembang pesat, program atau proyek sosial cenderung mengalami lonjakan permintaan atau mendapatkan dukungan finansial yang lebih besar, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat (Anwar, 2022).

Pertumbuhan ekonomi yang positif biasanya menciptakan lebih banyak peluang kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan umum, yang pada gilirannya dapat memperkuat nilai SROI. Budhijana (2020) program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi atau pelatihan keterampilan dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dalam ekonomi yang berkembang, karena peserta program mungkin lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha sendiri, yang meningkatkan dampak sosial dari program tersebut.

Sebaliknya, dalam kondisi resesi ekonomi, dampak finansial dari program-program sosial bisa menurun secara signifikan. Resesi sering kali diiringi dengan penurunan pendapatan, meningkatnya pengangguran, dan berkurangnya sumber daya publik untuk mendukung program-program sosial. Dalam situasi ini, program yang sebelumnya efektif mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Sebagai contoh, program pelatihan kerja mungkin tidak seefektif sebelumnya jika tidak ada cukup lapangan pekerjaan yang tersedia, terlepas dari seberapa baik pelatihan tersebut dijalankan. Akibatnya, nilai SROI dari program tersebut bisa menurun karena manfaat yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Tingkat pengangguran juga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan dan dampak program sosial, yang pada akhirnya mempengaruhi SROI. Ketika tingkat pengangguran tinggi, kebutuhan akan program-program sosial seperti pelatihan kerja, dukungan penghasilan, dan inisiatif pemberdayaan masyarakat meningkat. Program yang dirancang untuk mengatasi pengangguran dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

dan mengurangi beban sosial ekonomi. Jika program berhasil mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan, nilai SROI dapat meningkat, menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan telah memberikan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan.

Namun, jika program-program tersebut tidak berhasil di tengah kondisi pengangguran yang tinggi, misalnya karena kurangnya koordinasi, sumber daya yang tidak mencukupi, atau tantangan struktural dalam pasar tenaga kerja, maka nilai SROI bisa mengalami penurunan. Program yang gagal memberikan hasil yang diharapkan mungkin tidak hanya menghabiskan sumber daya tanpa memberikan manfaat yang signifikan, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap intervensi sosial yang didukung oleh pemerintah atau lembaga lainnya.

Selain itu, dalam konteks ekonomi yang sedang berjuang, penting bagi para perancang program untuk mempertimbangkan fleksibilitas dan adaptabilitas strategi mereka. Program yang rigid atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, dalam situasi resesi, mungkin diperlukan penyesuaian fokus program dari pelatihan keterampilan khusus ke dukungan penghasilan langsung atau

pengembangan usaha kecil yang lebih cepat memberikan hasil.

Secara keseluruhan, tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran adalah faktor-faktor kunci yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sosial. Memahami dinamika ekonomi memungkinkan para pembuat kebijakan dan perancang program untuk menyesuaikan strategi mereka sehingga dapat meningkatkan nilai SROI, baik dalam situasi ekonomi yang positif maupun dalam menghadapi tantangan resesi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang berubah adalah kunci untuk memastikan bahwa program-program sosial tetap efektif, relevan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang dilayani.

## 2. Inflasi

Inflasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan dan efektivitas program-program sosial, terutama yang diukur berdasarkan nilai keuangan atau moneter (Rahmah et al, 2024). Salah satu efek utama inflasi adalah mengurangi nilai riil dari manfaat keuangan yang dihasilkan oleh sebuah program seiring berjalannya waktu (Sari & Septiano, 2024). Ini berarti bahwa manfaat sosial yang, pada awalnya, dihitung dalam istilah moneter pada tahun tertentu mungkin akan memiliki

nilai yang lebih rendah di masa mendatang jika tingkat inflasi meningkat.

Jika suatu program menghasilkan dampak finansial sebesar satu juta rupiah pada tahun ini, dalam kondisi inflasi yang tinggi, nilai riil dari satu juta rupiah tersebut bisa berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, untuk menjaga akurasi dan relevansi dalam penghitungan Social Return on Investment (SROI), sangat penting untuk memasukkan faktor inflasi dalam perhitungan tersebut.

Penyesuaian terhadap inflasi dalam penghitungan SROI membantu memastikan bahwa nilai manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut tetap relevan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Tanpa penyesuaian ini, estimasi SROI bisa memberikan gambaran yang terlalu optimistis atau menyesatkan mengenai dampak sosial dari program tersebut. Inflasi tidak hanya mempengaruhi nilai manfaat yang diukur, tetapi juga dapat meningkatkan biaya operasional program, yang mencakup biaya material, tenaga kerja, dan administrasi.

Jika biaya bahan baku meningkat akibat inflasi, biaya keseluruhan untuk menjalankan program juga akan meningkat. Demikian pula, kenaikan biaya hidup dapat memaksa



organisasi untuk menaikkan upah tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan total biaya operasional.

Meningkatnya biaya ini dapat berdampak negatif pada nilai SROI karena surplus sosial yang dihasilkan oleh investasi awal mungkin akan berkurang. Jika biaya untuk menjalankan program melonjak lebih cepat daripada peningkatan manfaat yang dihasilkan, maka SROI cenderung menurun. Artinya, investasi yang sebelumnya dianggap memberikan nilai sosial yang tinggi mungkin menjadi kurang efisien atau bahkan tidak layak jika inflasi tidak dikelola dengan baik.

Selain itu, inflasi juga bisa mempengaruhi bagaimana program dirancang dan diimplementasikan. Organisasi mungkin perlu mempertimbangkan strategi-strategi baru untuk mengurangi dampak inflasi, seperti mencari sumber bahan baku yang lebih murah, meningkatkan efisiensi operasional, atau bahkan menyesuaikan target program untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah.

Jika inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok naik, program-program yang sebelumnya difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mungkin perlu dialihkan untuk menyediakan bantuan langsung bagi masyarakat yang

terkena dampak paling parah oleh kenaikan harga tersebut. Secara keseluruhan, memahami dan mengelola dampak inflasi adalah elemen kunci dalam mempertahankan keberlanjutan dan efektivitas program-program sosial.

Dengan mengintegrasikan faktor inflasi ke dalam analisis dan perencanaan, organisasi dapat lebih baik memprediksi tantangan di masa depan dan menyesuaikan strategi mereka untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tetap memberikan nilai sosial yang maksimal, bahkan dalam kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi dalam manajemen program, sehingga nilai SROI yang dihasilkan dapat mencerminkan dampak sosial yang sesungguhnya dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

### **3. Perubahan Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Sosial**

Perubahan kebijakan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap berbagai sektor, terutama yang berkaitan dengan subsidi atau insentif (Sari, 2024). Pemerintah sering kali menyesuaikan kebijakan ini untuk menanggapi dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang (Ibnu et al, 2024). Setiap perubahan yang dilakukan, baik itu dalam bentuk peningkatan pajak,

pengenalan regulasi baru, atau bahkan pengurangan insentif, dapat mempengaruhi keberlanjutan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Jika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan pajak atau memperkenalkan peraturan yang lebih ketat, biaya operasional program tertentu bisa meningkat. Hal ini secara langsung akan mengurangi surplus anggaran yang tersedia, yang pada gilirannya dapat menurunkan nilai Social Return on Investment (SROI). SROI adalah indikator penting yang mengukur dampak sosial dari sebuah investasi, dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan biaya yang terkait (Malini et al, 2024).

Sebaliknya, jika pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pajak atau melakukan deregulasi, program-program tersebut dapat diuntungkan melalui penurunan biaya operasional dan peningkatan manfaat. Ini bisa memperkuat SROI karena lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk diinvestasikan kembali dalam program tersebut, atau untuk memperluas cakupan dan dampaknya. Selain itu, deregulasi bisa memberikan kebebasan lebih bagi sektor swasta untuk berinovasi, yang pada akhirnya dapat menciptakan solusi yang lebih

efektif dan efisien dalam menangani masalah sosial.

Selain kebijakan pemerintah, perubahan sosial juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi dampak dan keberlanjutan program sosial. Misalnya, penuaan populasi adalah fenomena global yang dapat menggeser prioritas dalam kebijakan public (Aprianti et al, 2022). Program yang awalnya dirancang untuk mendukung anak-anak muda mungkin perlu disesuaikan seiring perubahan demografi. Jika populasi lansia meningkat, mungkin akan ada kebutuhan yang lebih besar untuk program-program yang mendukung kesejahteraan lansia, dan program yang tidak menyesuaikan diri dengan perubahan ini mungkin akan melihat penurunan dalam nilai SROI.

Urbanisasi, sebagai tren sosial lainnya, juga mempengaruhi bagaimana program sosial dijalankan dan dinilai. Perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan menciptakan kebutuhan baru, seperti perumahan yang terjangkau, infrastruktur kota yang memadai, serta layanan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan perkotaan. Program yang berhasil menanggapi tantangan ini dengan cara yang efisien kemungkinan besar akan memiliki nilai SROI yang tinggi. Sebaliknya, jika kesenjangan sosial di perkotaan meningkat, ini

mungkin menciptakan peluang bagi program sosial untuk mendapatkan dampak yang lebih besar, karena kebutuhan akan intervensi yang efektif juga meningkat.

Secara keseluruhan, baik perubahan kebijakan pemerintah maupun dinamika sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan dan efektivitas program sosial. Program yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini, baik

melalui penyesuaian strategi maupun perancangan ulang program, akan lebih mungkin untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai SROI mereka. Inilah mengapa pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan politik sangat penting bagi para perancang program dan pengambil kebijakan dalam menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan

#### KESIMPULAN DAN SARAN

Ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia, terutama di wilayah pesisir, merupakan masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan dan kesejahteraan. Meskipun program pemberdayaan ekonomi telah diinisiasi oleh pemerintah, perusahaan, dan organisasi non-pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ini, penerapan Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi dampak program masih menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan dalam penerapan SROI berasal dari berbagai pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, dan penerima manfaat program. Bagi perusahaan, kendala utama adalah fokus pada kepatuhan regulasi dan reputasi, serta kompleksitas dan biaya tambahan

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SROI. Pemerintah menghadapi tantangan dalam birokrasi, keterbatasan kapasitas, dan prioritas anggaran yang lebih terfokus pada hasil jangka pendek. Sementara itu, masyarakat pesisir sebagai penerima manfaat sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami konsep SROI, orientasi jangka pendek, serta himpitan ekonomi sehari-hari yang membuat mereka lebih fokus pada kelangsungan hidup daripada partisipasi dalam evaluasi jangka panjang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir Indonesia, perlu adanya peningkatan kapasitas dalam penerapan SROI, serta penyesuaian pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, kebijakan yang lebih komprehensif

dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S. E., Hermanto, A., Yasya, W., Kristanti, R., & Chrisye, M. (2021). Akses terhadap sumber daya alam pada kemiskinan dan ketahanan pangan. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 7(2), 172–185.  
<https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664>
- Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani*, 6(2), 68–85.  
<https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>
- Akbar, K. F., & Dewayanto, T. (2022). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Efek Moderasi Manajemen Laba (Studi Empiris Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* (PKN), 4(1S), 343–356.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1905>
- Aprianti, D. I., Suyanto, S., & Choirudin, S. (2022). Tantangan Bonus Demografi Bagi Pemerintah. *Nusantara Innovation Journal*, 1(1), 10–18.  
<https://doi.org/10.70260/nij.v1i1.12>
- Arbarini, M., Rifai, A., & Mulyono, S. (2018). Model literasi berbasis entrepreneurship dalam peningkatan ekonomi produktif perempuan istri nelayan tradisional. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(2), 170–178.  
<https://doi.org/10.15294/jnece.v2i2.27505>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017.
- Budhijana, R. B. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Index Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2000-2017. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Perbankan*, 5(1), 36-44.  
<https://doi.org/10.35384/jemp.v5i1.170>
- Bustomi, M. Y., Aryanto, D., Sukariyan., Pratiwi, W., Faizal. (2024). Pengukuran Dampak Program CSR Aplikasi Kelola Usaha Ramah Lingkungan Melalui Pendekatan Social Return on Investment. *Jurnal Kirana*, 5(1), 55-65.

- <https://doi.org/10.19184/jkkn.v5i1.46848>.
- Chalid, A. & Manjib, T. (2021). Strategi Kelompok Nelayan dalam Mereduksi Politik Patron Klien di Kabupaten Maros. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 60-73.
- Corvo, L., Pastore, L., & Mastrodascio, M. (2022). The social return on investment model: a systematic literature review. 30(7), 49–86. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2021-1307>.
- Dianitha, K., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman di BEI. *Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(2), 127-136. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i2.2874>.
- Doaly, T. (2023). Outlook KNTI: 80% nelayan kecil berpendidikan di bawah SMP. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2023/02/17/outlook-knti-80-nelayan-kecil-berpendidikan-di-bawah-smp/>
- Gachter, S., Mengel, F., Tsakas, E., & Vostroknutov, A. (2017). Growth and Inequality in Public Good Provision. *Journal of Public Economics*, 150, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.jpube.co.2017.03.002>.
- Geofrey, T. & Kungu, J. N. (2020). The Implication of Political Patron-Client Linkages On Democratic Governance In Developing Democracies. International Journal of Innovative Research and Advanced Studies (IJIRAS), 7(4), 211-218.
- Hakim, A. A., Kurniavandi, D. F., Mashar, A., Butet, N. A., Zairion, Maduppa, H., & Wardiatno, Y. (2020). Study on stock structure of Indian mackerel (*Rastrelliger kanagurta* Cuvier, 1816) in fisheries management area 712 of Indonesia using morphological characters with truss network analysis approach. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci*, 414. Artikel 012006. <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/414/1/012006>.
- Ibnu, S., Nasim, A. S., Zainuddin Arifin, Rahmatullah, & Afrilia, U. A. (2024). Pertarungan Kekuasaan dan Dinamika Sosial: Memahami Perspektif Baru. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2), 655-668. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.5518>
- Iyer, R., & Agrawal, P. (2014). Social Return on Investment – Measuring the Impact
- Kim, D. (2016). The Associations Between US State and Local Social Spending, Income Inequality, And Individual All-Cause and Cause-Specific Mortality: The National Longitudinal Mortality Study. *Preventive Medicine*, 84, 62–68. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.11.013>.
- KNTI - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

- (2020). Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kehidupan Sosial-ekonomi Nelayan dan Pembudidaya. <https://knti.or.id/analisis-dampak-covid-19-terhadap-kehidupan-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya/>
- Malini, H., Arisetyadhi, I., & Rustam, Y. (2024). Analisis ROI (Return on Social Investment) Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan PT PLN (Persero): Upaya Pemberdayaan Wanita Difable melalui Pelatihan Pembuatan Batik Bekerja Sama dengan Rumah Batik Berkah Jambi. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(1), 49–60. <https://doi.org/10.37149/jia.v9i1.917>
- Muksin, A., Maharani, T. Z., Gita, N. Z., Rosicky, R., & Nurjanah, W. (2024). Strategi Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Untuk Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya Publik. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(7), 133–143. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i7.3076>.
- Nadjib, M. (2013). Agama, etika dan etos kerja dalam aktivitas ekonomi masyarakat nelayan Jawa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 19–32. <https://doi.org/10.14203/JEP.21.2.2013.19-32>.
- Nainggolan, H. L., Aritonang, J., Ginting, A., Sihotang, M. R., & Gea, M. A. P. (2021). Analisis dan strategi peningkatan pendapatan nelayan tradisional di kawasan pesisir Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 16(2), 237–256.
- Pangidunan, E., Manoppo, V. E. N., Kotambunan, O. V., Sondakh, S. J., Longdong, F. V., & Aling, D. R. R. (2023). Kontribusi pekerjaan sampingan nelayan pancing ulur terhadap perekonomian keluarga di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Akulturasi: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 11(1), 213–221. <https://www.researchgate.net/publication/334674176>
- Rahmah, Z. Z., Yuliani, Mutfarida, B., Chamdan Purnama, Dinda Fatmah, Mirhamida Rahmah, Syaiful Hasani, & Yusriyah Rahmah. (2024). Manajemen Pendapatan Nasional Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Kritis. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 21(1), 32–44. <https://doi.org/10.29313/performa.v21i1.3713>
- Salim, A., Hermawan, W., Bukido, R., Umar, M., Ali, N., Idris, M., Willya, E., Mubarak, A. Z. S., Rasyid, A., Yusuf, N., Tohis, R., Habibie, A. R., Manese, R. M., Bustomi, A., Faizah, S. I., Ilmudinulloh, R., Samad, T. F. D., Firmansyah, M. I., Nisa, M., Utomo, B. A. A., Abdullah, A. W., Botma, A., Gunawan, E., Subeitan, S. M., Hayati, M., Romli, U., Nafisah, S., Faizah,

- R., & Azizah, N. (eds.) (2023). Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal. Penerbit Selaras Media Kreasindo.
- Saraha, M. H. I. (2023). Evaluation of Implementation of The Paket C Equivalent Learning Program In Morotai Island Regency. *Jurnal Penelitian Mitita*, 1(1), 39-49.
- Sari, D., Nugroho, F., & Warningsih, T. (2020). The influence of “Program Keluarga Harapan (PKH)” on the income level of fishers at Bagan Hulu, Bangko sub-regency, Rokan Hilir regency. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 251–258.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i4.231>
- Sari, L., & Septiano, R. (2024). Inflasi Terhadap Laba Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 804-813. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i2.363>.
- Septasawitri, D., Prabawani, B., & Nugraha, H. S. (2023). Analisis Social Return On Investment (SROI) dalam Penerapan Program Ketahanan Ekonomi dan Pangan Rumah Tangga Desa Dendang. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 43-53. <https://doi.org/10.14710/jab.v12i1.45914>.
- Shao, C., Meng, X., Cui, S., Wang, J., & Li, C. (2016). Income-Related Health Inequality of Migrant Workers in China and Its Decomposition: An Analysis Based On The 2012 China Labor-Force Dynamics Survey Data. *Journal of the Chinese Medical Association*, 79(10), 531–537. <https://doi.org/10.1016/j.jcma.2016.02.009>.
- Suhartanti, R., Suharso, P., & Ani, H.M. (2022). Gaya hidup masyarakat nelayan pantai Prigi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 16(1), 27–32. <https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.22459>.
- Vita, B. & Yanti, I. (2014). Peningkatan Kapasitas Nelayan Terkait Upaya Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan. *Human Resource Capacity Fishermen Related Efforts in The Defense of The Border*, 15–24.
- Wasiaturrahma, Sulisttyowati, C., Heryati, D., & Ajija, S. R. (2020). Improving the cooperative performance through financial management assistance in Koperasi 64 Surabaya. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 2(1), 256–267. <https://jurnal.unpad.ac.id/jpk/article/view/1415#:~:text=Hasil%20penelitian%20menunjukk an%20bahwa%20kontribusi,ta ngga%20didominasi%20oleh %20wanita%20nelayan.>

- Widyanita. (2017). Ketimpangan Ekonomi Indonesia Peringkat 4. Katadata News. Online Webpage.  
<https://katadata.co.id/infografik/2017/01/15/ketimpanganekonomi-indonesia-peringkat-4>
- World Bank (2015). Meluasnya Ketimpangan di Indonesia. World Bank. Online Webpage.
- <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesiarising-divide>.
- Establishment of The Herbal Tourism Village in Surabaya. Kuala Lumpur: ResearchGate.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan - cetakan ke 3. Jakarta: Kencana.